Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 28736-28751

Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani bagi Narapidana Asing dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

I Gede Aditya Bayu Purwadi[1], Iman Santoso[2]
[1,2] Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia
e-mail: adityabayupurwadi@gmail.com[1], imsato1979@gmail.com[2]

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Penanganan narapidana asing dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan perbedaan budaya, bahasa, dan kebutuhan rohani. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan yang dikenal menampung sejumlah besar narapidana asing, menerapkan program pembinaan kepribadian rohani sebagai salah satu strategi pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program tersebut dalam kerangka sistem pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap narapidana asing, petugas pembinaan, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan rohani di Lapas Kerobokan dilaksanakan secara inklusif, mencakup berbagai agama dan keyakinan yang dianut narapidana asing. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan spiritualitas, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian perilaku, peningkatan disiplin, serta penciptaan iklim yang lebih kondusif di dalam lapas. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga pembina, hambatan bahasa, dan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi program pembinaan rohani bagi narapidana asing memiliki peran signifikan dalam mendukung tujuan pemasyarakatan, yakni membentuk narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus menumbuhkan suasana harmonis dalam kehidupan lapas yang multikultural.

Kata Kunci: *Pembinaan Kepribadian Rohani, Narapidana Asing, Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Kerobokan, Multikultural.*

ABSTRACT

The management of foreign prisoners in the Indonesian correctional system faces complex challenges, particularly related to cultural differences, language differences, and spiritual needs. Kerobokan Class IIA Penitentiary, known for housing a large number of foreign prisoners, implements a spiritual personality development program as one of its development strategies. This study aims to examine the implementation of this program within the framework of the Indonesian correctional system. The research method used was a qualitative case study approach, using interviews, observation, and documentation techniques with foreign prisoners, correctional officers, and other relevant parties. The results show that the spiritual development program at Kerobokan Prison is implemented inclusively, encompassing the various religions and beliefs held by foreign prisoners. This program not only focuses on enhancing spirituality but also contributes to behavioral control, improving discipline, and creating a more conducive climate within the prison. However, there are obstacles such as limited counselors, language barriers, and a lack of adequate supporting facilities. The conclusion of this study confirms that the implementation of a spiritual development program for foreign prisoners plays a significant role in supporting correctional goals, namely shaping prisoners to recognize mistakes, improve themselves, and not repeat crimes, while simultaneously fostering a harmonious atmosphere within a multicultural prison environment.

Keywords: *Spiritual Personality Development, Foreign Prisoners, Correctional Services, Class IIA Kerobokan Prison, Multicultural.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki akar historis sejak masa penjajahan Belanda yang menitikberatkan pada pendekatan penghukuman dan pembalasan. Model ini bertujuan menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan, sebagaimana tercermin dari kondisi penjara yang tidak manusiawi dan kurang memperhatikan pembinaan narapidana (Barda Nawawi Arief, 2016). Setelah Indonesia merdeka, terjadi pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih humanis dengan orientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas, 2020). Pergeseran ini selaras dengan berkembangnya pemikiran kriminologi dan reformasi hukum pidana yang menekankan pentingnya pembinaan daripada sekadar hukuman.

Transformasi sistem pemasyarakatan Indonesia tidak terlepas dari pemikiran progresif Dr. Saharjo. Dalam Konferensi Lembang, ia mengemukakan bahwa pemidanaan seharusnya ditujukan untuk melindungi masyarakat sekaligus membina pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang bermanfaat (Ditjenpas, 2020). Filosofi ini menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan harus menjadi ruang pendidikan dan pelatihan bagi narapidana, bukan sekadar tempat penghukuman. Pandangan tersebut diperkuat oleh keyakinan bahwa narapidana yang dibimbing secara tepat memiliki potensi besar untuk berubah menjadi individu yang konstruktif dalam masyarakat (Mulyana et al., 2023).

Sistem pemasyarakatan yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan lama yang hanya berfokus pada penghukuman. Tujuan utamanya adalah membentuk narapidana menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini juga mampu mengurangi angka residivisme, seperti yang disampaikan oleh Laode (2025), karena narapidana dibekali keterampilan dan nilai-nilai sosial selama masa hukuman. Keberhasilan pendekatan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap kelemahan sistem kepenjaraan lama yang kerap melanggar hak asasi manusia dan tidak mampu mencegah kejahatan berulang.

Regulasi terbaru memperkuat arah sistem pemasyarakatan yang humanis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan diberikan enam fungsi utama, yaitu pelayanan, bimbingan, pembinaan sosial, perawatan, pengamanan, dan pengawasan (Avandi & Subroto, 2023). Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan orientasi agar narapidana dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi dua kategori utama: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Samosir, 2016). Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum, moralitas, serta tanggung jawab sosial. Salah satu aspek penting dari pembinaan ini adalah pembinaan rohani yang berfungsi meningkatkan ketakwaan dan memperkuat nilai-nilai etika narapidana. Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan kerja dan kemampuan vokasional yang berguna setelah masa pidana berakhir.

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pada dasarnya mengacu pada prinsip yang sama, namun berbeda dalam pendekatan teknis. WNI diarahkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat Indonesia, sedangkan WNA disiapkan untuk kembali ke negara asal setelah menjalani hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU No. 22 Tahun 2022. Kendala bahasa, perbedaan budaya, serta keterbatasan sumber daya membuat pelaksanaan pembinaan terhadap WNA harus lebih fleksibel dan kontekstual menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Tren meningkatnya jumlah WNA yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir turut memberikan tantangan baru bagi sistem pemasyarakatan. Sepanjang tahun 2024, lebih dari 46 juta WNA tercatat masuk ke wilayah Indonesia, dengan Provinsi Bali sebagai daerah tujuan utama (Tempo.co; BPS Bali, 2024). Tingginya mobilitas ini berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggaran hukum yang melibatkan WNA dan menyebabkan bertambahnya narapidana asing di lembaga pemasyarakatan, khususnya di wilayah yang menjadi pusat pariwisata.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan di Bali merupakan salah satu lapas yang menampung cukup banyak narapidana asing, terutama yang terlibat dalam kasus narkotika. Lapas ini menghadapi tantangan serius seperti overkapasitas, keberagaman budaya, serta keterbatasan tenaga dan sarana pembinaan. Implementasi program pembinaan kepribadian rohani di tempat ini memerlukan

strategi yang inklusif dan adaptif agar mampu mengakomodasi berbagai latar belakang agama dan budaya narapidana asing.

Situasi di Lapas Kerobokan menjadi lebih kompleks dengan meningkatnya jumlah WNA yang terlibat tindak pidana. Data menunjukkan bahwa jumlah WNA yang terlibat dalam kejahatan di Bali meningkat dari 194 orang pada 2023 menjadi 226 orang pada 2024. Jenis pelanggaran yang terjadi pun beragam, mulai dari pencurian hingga peredaran narkotika. Per 15 Maret 2025, jumlah penghuni lapas ini tercatat sebanyak 1.169 orang, termasuk 51 WNA, jauh melebihi kapasitas ideal yang seharusnya hanya menampung 300–400 narapidana (Ditjenpas, 2020). Kondisi ini menciptakan tekanan tambahan dalam pelaksanaan pembinaan yang layak.

Beberapa kasus besar yang melibatkan WNA seperti Schapelle Corby dan anggota Bali Nine memperkuat sorotan internasional terhadap perlakuan narapidana asing di Indonesia. Kasus-kasus ini memperlihatkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih profesional, adaptif, dan peka terhadap perbedaan budaya serta agama. Penerapan program pembinaan rohani harus dirancang secara kontekstual untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang efektif. Lapas Kerobokan menjadi tempat yang tepat untuk mengkaji implementasi program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing. Kajian terhadap dinamika pembinaan di lapas ini tidak hanya penting untuk perbaikan sistem pemasyarakatan secara nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan citra Indonesia di mata internasional.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk menganalisis implementasi program pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kerobokan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam konteks global, penelitian ini relevan untuk meningkatkan citra sistem pemasyarakatan Indonesia di mata dunia terkait penanganan narapidana asing, sekaligus memberikan manfaat praktis dalam pengembangan pendekatan pembinaan yang lebih inklusif dan efektif. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengisi celah pengetahuan yang ada, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi holistik.

METODE

Creswell (2016) menjabarkan metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan guna mengeksplorasi dan mendalami makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok terhadap berbagai fenomena sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, peran petugas induksi dan orientasi saat seseorang pertama kali memasuki lingkungan tahanan menjadi objek kajian yang relevan dalam penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menelaah bagaimana interaksi sosial, sikap, serta persepsi individu dan kelompok berkontribusi terhadap pembentukan mentalitas seseorang di lingkungan tersebut. Melalui analisis yang mendalam, penelitian kualitatif dapat mengungkap dinamika sosial yang terjadi dan memberikan wawasan tentang proses adaptasi serta perubahan perilaku yang dialami oleh individu dalam situasi tertentu.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk lebih leluasa dalam mengeksplorasi konteks serta kompleksitas suatu fenomena yang sedang dikaji. Dengan menelaah berbagai kasus secara mendetail, mengamati dinamika hubungan sosial, serta mengkaji berbagai kejadian yang berlangsung di lokasi, peneliti dapat mendalami wawasan yang lebih komprehensif tentang mekanisme Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani Terhadap Narapidana Asing Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia: Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani Bagi Narapidana Asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kelas IIA Kerobokan merupakan bagian dari upaya pembinaan narapidana secara menyeluruh, termasuk narapidana asing. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kesadaran spiritual para narapidana agar dapat menjalani masa pidana dengan lebih positif. Dalam bagian ini, implementasi program dianalisis berdasarkan tiga dimensi teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Grace, yaitu konteks, organisasi, dan aktor, yang saling mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembinaan rohani di dalam Lapas.

1. Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian Rohani

Sebagai langkah pertama, I Wayan Suwitrayasa, Kepala Seksi Binadik Subseksi Bimkemaswat Lapas Kerobokan, menyoroti pentingnya keberagaman sosial dan budaya Bali dalam mendukung pembinaan kerohanian. Bali, dengan masyarakat yang multi agama, menawarkan suatu lingkungan yang sangat toleran, memudahkan warga binaan asing untuk mengikuti kegiatan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Keberagaman ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, yang pada gilirannya mendukung tujuan pembinaan kerohanian, membantu rehabilitasi dan integrasi narapidana asing ke dalam masyarakat Bali dan Indonesia secara keseluruhan.

Selanjutnya, Franky Simin menjelaskan tentang pemberian kesempatan dan ruang yang luas bagi warga binaan untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Ini adalah bagian dari upaya pihak Lapas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan rohani para narapidana. Pemberian ruang yang memadai bagi warga binaan untuk beribadah menunjukkan komitmen Lapas dalam menyediakan sarana untuk pembinaan kepribadian rohani, yang sejalan dengan tujuan utama program ini.

"Eh kalau dari seksi pembinaan tidak ada ya, telah mereka memberikan ruang, memberikan kesempatan, tempat seluas-luasnya untuk kita apa namanya… melaksanakan kegiatan ibadah di Lapas Kerobokan (Wawancara dengan FS, Petugas Lapas kelas IIA Kerobokan dilakukan di dalam gereja pada tanggal 11 April 2025 pukul 08.55 WITA, partisipan menggunakan seragam PDL."

Lebih dari sekadar rutinitas administratif, kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa spiritualitas memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi narapidana. Dalam konteks narapidana asing, pemberian ruang dan kesempatan ibadah ini juga menjadi bentuk penerapan prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam regulasi pemasyarakatan nasional. Dengan tidak membedakan latar belakang agama dan kebangsaan, Lapas Kelas IIA Kerobokan memberi ruang inklusif yang memungkinkan setiap individu menjalani proses pembinaan secara utuh.

Hal ini menjadi semakin signifikan mengingat keberagaman agama yang dianut oleh para narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan. Pemberian ruang ini juga mendukung narapidana dalam mengelola stres, membentuk rutinitas positif, serta menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis di dalam Lapas.

Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan pendekatan yang berbasis kebutuhan (*need-based approach*) di mana program pembinaan diupayakan tetap berjalan dengan mempertimbangkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi narapidana, termasuk narapidana asing. Ini selaras dengan prinsip pemasyarakatan yang menempatkan kesejahteraan narapidana sebagai bagian dari proses reintegrasi yang berkelanjutan.

Temuan ini menguatkan bahwa kegiatan pembinaan kerohanian tidak hanya bersifat simbolik atau ritualistik, tetapi juga memiliki dimensi psikososial yang nyata. Kegiatan keagamaan, seperti sekolah Alkitab dan pengajian, menyediakan ruang bagi narapidana untuk merefleksikan kehidupan, mengembangkan kesadaran moral, dan membangun harapan akan kehidupan yang lebih baik pasca-pemasyarakatan. Ini sejalan dengan teori rehabilitasi sosial yang menempatkan aspek spiritual sebagai salah satu komponen penting dalam proses reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan program pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak terlepas dari keterlibatan pihak eksternal, terutama lembaga keagamaan dan komunitas masyarakat. M. Faldy Arilaha, Koordinator Program Pembinaan, menjelaskan bahwa kegiatan rohani di lapas difasilitasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Sekolah Teologi dan Sekolah Alkitab untuk pembinaan kristiani, serta Kementerian Agama untuk kegiatan keislaman. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengajaran agama, siraman rohani, pelatihan membaca kitab suci, dan aktivitas keagamaan rutin seperti pengajian dan ibadah mingguan.

Melalui sistem ini, para petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang aktif dalam proses rehabilitasi warga binaan. Mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara narapidana dengan pihak pembina, sekaligus memberikan bimbingan informal dalam kehidupan sehari-hari di dalam Lapas. Dengan pendekatan ini, proses pembinaan tidak hanya berlangsung dalam ruang-ruang formal seperti masjid atau gereja, tetapi juga hadir secara konsisten dalam interaksi keseharian narapidana.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem wali dan peran aktif petugas menjadi salah satu pondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kelas IIA Kerobokan, baik bagi narapidana lokal maupun asing. prosedur yang berjenjang ini, program pembinaan diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak terhadap perubahan sikap dan perilaku narapidana, termasuk warga negara asing.

Meskipun prosedur nasional menjadi pedoman utama, pelaksanaannya di tingkat Lapas tetap menyesuaikan dengan konteks keberagaman latar belakang para narapidana, khususnya warga negara asing. Menurut Franky Simin, petugas pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIA Kerobokan, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara tata ibadah umat Kristiani Indonesia dengan warga binaan asing, terutama yang berasal dari latar Gereja Ortodoks atau bahkan yang tidak beragama (atheis).

Kondisi ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perbedaan budaya dan keyakinan yang tidak selalu sejalan dengan mayoritas sistem ibadah yang berlaku di Indonesia. Penyesuaian ini penting agar pembinaan kerohanian tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga relevan dan bermakna bagi narapidana asing. Dengan cara ini, program pembinaan menjadi lebih inklusif dan efektif dalam menjangkau keberagaman yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Kerobokan.

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah keterlibatan langsung para petugas serta penerapan sistem pengawasan yang ketat. Hal ini tidak hanya menyangkut kelancaran teknis kegiatan, tetapi juga menyangkut aspek keamanan dan pengendalian terhadap potensi gangguan yang bisa timbul selama kegiatan berlangsung.

Menurut I Wayan Suwitrayasa, Kepala Bidang Lapas Kelas IIA Kerobokan, kegiatan pembinaan keagamaan, termasuk yang diikuti oleh warga negara asing, selalu dilaksanakan dengan pendampingan dari petugas pembimbing dan pengawasan dari petugas keamanan. Dalam praktiknya, kehadiran petugas pembimbing berfungsi sebagai fasilitator sekaligus pengarah dalam kegiatan keagamaan yang diikuti oleh narapidana.

Sementara itu, petugas keamanan bertugas memastikan bahwa seluruh jalannya kegiatan berlangsung tertib dan aman. Ini mencakup pemeriksaan terhadap pihak luar yang masuk untuk memberikan pelayanan keagamaan, pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa, serta pengontrolan terhadap situasi selama kegiatan berlangsung. Dalam konteks narapidana asing, yang mungkin membawa latar belakang budaya dan kebiasaan berbeda, pengawasan ini juga berfungsi sebagai pengendali terhadap potensi kesalahpahaman atau penyalahgunaan aktivitas pembinaan.

Keberadaan petugas sebagai aktor utama dalam pengawasan dan pendampingan mencerminkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga personal dan partisipatif. Petugas di Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak sekadar menjalankan perintah struktural, tetapi juga membangun komunikasi dengan warga binaan, termasuk narapidana asing, untuk memastikan bahwa program pembinaan benar-benar diterima dan dijalankan secara efektif.

Keterlibatan aktif petugas ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjamin akuntabilitas program pembinaan kepribadian rohani. Dengan pengawasan yang melekat dan prosedur yang terstandarisasi, program ini dapat dipastikan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip keamanan, keterbukaan, dan inklusivitas dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antar seksi dalam struktur organisasi internal lembaga. Koordinasi yang baik antarunit ini menjadi pondasi penting bagi kelangsungan program, terutama dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan terstruktur.

Sebagai contoh, Seksi Tata Usaha (TU) berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, seperti ruangan ibadah, perlengkapan ibadah, serta dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pembinaan. Tanpa dukungan logistik yang memadai dari TU, kegiatan pembinaan sulit berjalan secara optimal, terlebih bagi warga binaan asing yang terkadang membutuhkan penyesuaian tertentu dalam hal fasilitas.

Sementara itu, Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) berfungsi sebagai garda depan dalam menjaga keamanan kegiatan, baik terhadap kemungkinan gangguan dari internal maupun pengawasan terhadap pihak eksternal yang masuk. Petugas Kamtib bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang

dan barang yang keluar masuk selama kegiatan pembinaan berlangsung, termasuk terhadap ustad atau pendeta dari luar yang terlibat sebagai pembina.

Kemudian, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memiliki tanggung jawab dalam koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk memastikan bahwa pengamanan tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga administratif. Dalam hal ini, KPLP turut memantau jalannya kegiatan dan mengambil langkah-langkah preventif terhadap potensi risiko keamanan.

Kolaborasi ini menciptakan sistem yang sinergis di mana setiap seksi bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya namun tetap terhubung dalam satu tujuan: keberhasilan pembinaan narapidana, termasuk mereka yang berkewarganegaraan asing. Pendekatan kolektif ini memperlihatkan bahwa pembinaan bukan hanya urusan satu unit kerja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen di dalam Lapas. Dengan adanya koordinasi internal yang kuat, program pembinaan rohani tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga lebih efektif dalam menyasar aspek pembentukan kepribadian narapidana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Suwitrayasa menegaskan bahwa keterlibatan WBP dalam kegiatan pembinaan rohani berlangsung secara sukarela. Artinya, meskipun pembinaan merupakan bagian dari tahapan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian dan syarat untuk mendapatkan hak-hak integratif, pelaksanaannya tidak dilakukan secara koersif. Narapidana diberikan ruang untuk menyesuaikan diri dengan proses pembinaan, baik dalam konteks budaya maupun agama, sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan dengan kesadaran penuh dan kemauan sendiri.

Sikap inklusif ini juga terlihat dari penyesuaian jadwal dan tata ibadah yang memperhatikan latar belakang keagamaan WBP asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pihak Lapas berupaya menyesuaikan layanan pembinaan sesuai dengan keragaman agama yang dianut oleh warga binaan, termasuk bagi mereka yang berasal dari tradisi Ortodoks atau bahkan tidak memiliki afiliasi keagamaan yang kuat.

Dengan pendekatan seperti ini, Lapas Kelas IIA Kerobokan menunjukkan bahwa proses pembinaan bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga membangun hubungan kemanusiaan yang saling menghargai. Sikap ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi transformasi diri narapidana, dan pada akhirnya mendukung tujuan akhir sistem pemasyarakatan: reintegrasi sosial yang utuh, baik bagi WBP lokal maupun asing.

Keterlibatan narapidana asing dalam program pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kelas IIA Kerobokan menunjukkan dinamika yang khas. Berdasarkan penuturan M. Faldy Arilaha selaku Koordinator Program Pembinaan, pada awalnya keterlibatan mereka cenderung dipicu oleh pendekatan persuasif dengan nuansa koersi. Hal ini terjadi karena keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan, termasuk kerohanian, merupakan bagian dari syarat administratif untuk memperoleh hak integrasi seperti remisi atau pembebasan bersyarat.

Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan tersebut bertransformasi menjadi bentuk partisipasi yang lebih aktif dan sukarela. Faldy menyampaikan bahwa setelah mereka menjalani kegiatan pembinaan secara rutin, para WBP asing mulai memahami esensi kegiatan tersebut dan menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Hal ini tampak pada beberapa narapidana asal Belanda dan Rusia yang meskipun merupakan warga asing, secara aktif dan rutin mengikuti kegiatan keagamaan seperti salat dan pengajian. Perkembangan sikap ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang konsisten dan penyelenggaraan program yang adaptif, WBP asing dapat menyesuaikan diri dan bahkan turut aktif dalam kegiatan pembinaan rohani. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa program memiliki potensi untuk membentuk pemahaman spiritual lintas budaya, selama prosesnya diselenggarakan secara inklusif dan komunikatif.

Kolaborasi yang terbangun ini mencerminkan sebuah sistem yang bersifat inklusif dan suportif, di mana seluruh elemen – baik internal maupun eksternal – memiliki kepedulian yang sama dalam membina kepribadian narapidana. Terutama bagi warga negara asing, keberadaan sistem pendukung yang terkoordinasi ini mempermudah mereka untuk beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam program pembinaan yang ditawarkan, tanpa harus merasa terpinggirkan oleh batasan budaya dan bahasa.

Namun, salah satu tantangan paling signifikan dalam pelaksanaan program pembinaan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah

hambatan bahasa. Petugas Lapas, Franky Simin, menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam komunikasi karena banyak narapidana asing tidak memahami bahasa Indonesia, bahkan dalam konteks keagamaan seperti liturgi atau terminologi ibadah. Hal ini menyebabkan kegiatan pembinaan tidak selalu dipahami secara substansial oleh peserta asing, bahkan jika secara fisik mereka hadir dan mengikuti.

Tingkat partisipasi dan motivasi warga binaan asing dalam kegiatan pembinaan kerohanian menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan keterangan dari petugas Franky Simin, banyak narapidana asing menjalani pembinaan tanpa semangat atau komitmen yang tinggi. Partisipasi mereka lebih bersifat formalitas dan tergantung pada keinginan pribadi, bukan karena kesadaran spiritual yang kuat.

Ketiadaan komunitas pendukung dari luar—baik dalam bentuk jemaat, pendeta, rohaniwan, maupun forum diskusi keagamaan—menyebabkan proses pembinaan menjadi terisolasi dan kurang menyentuh aspek emosional atau spiritual narapidana. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi efektivitas pembinaan dan menghambat pencapaian tujuan reintegrasi sosial.

Pendekatan solutif yang lebih kontekstual dan berbasis pada latar belakang masing-masing WBP asing perlu dipertimbangkan, seperti pelibatan komunitas agama internasional atau penyediaan akses ke bahan-bahan pembinaan dalam bahasa mereka.

Tantangan teknis menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran dan keteraturan program pembinaan kerohanian, terutama ketika melibatkan WBP asing dengan berbagai latar belakang budaya dan keagamaan yang berbeda. Salah satu kendala yang cukup mencolok adalah jumlah pembina yang terbatas, yang dapat mempengaruhi efektivitas program.

"Jumlah pembina cukup saja… tapi tetap harus diawasi. (Wawancara dengan FS, Petugas Lapas Kelas IIA Kerobokan dilakukan di dalam Gereja pada tanggal 11 April 2025 pukul 08.55 WITA, partisipan menggunakan seragam PDL.)"

Jumlah petugas yang terbatas tidak hanya berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan kerohanian, tetapi juga pada pengawasan keamanan, mengingat WBP asing yang memiliki latar belakang berbeda seringkali membutuhkan pengawasan ekstra. Hal ini meningkatkan beban kerja petugas yang harus memastikan kegiatan berlangsung dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tantangan-tantangan ini mengharuskan adanya penyesuaian lebih lanjut pada sistem manajemen waktu, pembinaan, dan pengawasan di Lapas, guna memastikan bahwa kegiatan ibadah dapat berlangsung tanpa mengganggu kegiatan lainnya yang juga penting bagi kelangsungan sistem pemasyarakatan.

2. Analisis Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani Berdasarkan Teori Ripley & Grace

Untuk memahami sejauh mana program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan telah diimplementasikan secara efektif, maka diperlukan pendekatan analitis yang sistematis. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Ripley dan Grace. Teori ini menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tiga dimensi utama, yaitu konteks, organisasi, dan aktor.

Dimensi Konteks

Kehadiran narapidana asing di lembaga pemasyarakatan (Lapas) menghadirkan kompleksitas unik dalam implementasi program pembinaan. Tantangan ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan menyentuh dimensi fundamental seperti komunikasi, integrasi sosial, dan pemenuhan kebutuhan spiritual yang beragam. Realitas ini menuntut adanya adaptasi dalam pendekatan pembinaan kepribadian, khususnya pembinaan rohani, agar sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia dan non-diskriminasi yang universal.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, setiap narapidana, termasuk warga negara asing, berhak memperoleh layanan pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan relevan dengan identitas serta kebutuhan individual mereka (Waluyo, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meninjau status kewarganegaraan, tetapi lebih jauh menganalisis bagaimana faktor sosial-kultural dan kontekstual memengaruhi efektivitas implementasi program pembinaan di lingkungan Lapas.

Fokus kajian pada program pembinaan kepribadian rohani ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga pemasyarakatan mengelola kendala bahasa, keterbatasan akses terhadap pembina

rohani yang sesuai, dan adaptasi terhadap lingkungan keagamaan mayoritas yang berbeda. Implementasi program ini memerlukan pendekatan inklusif dan interkultural, yang diharapkan dapat mendorong transformasi perilaku dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang bertanggung jawab (Wirawan, 2019). Dengan demikian, penelitian ini berargumentasi bahwa keberhasilan program pembinaan sangat bergantung pada bagaimana dimensi konteks, organisasi, dan aktor berinteraksi secara dinamis, sebagaimana ditekankan oleh teori implementasi kebijakan Ripley & Grace. Analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan strategi adaptif dalam mewujudkan pembinaan yang efektif bagi narapidana asing.

1. Keberagaman Latar Belakang Agama dan Budaya sebagai Tantangan Utama

Implementasi program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya yang menyasar narapidana asing, senantiasa dihadapkan pada kompleksitas dimensi konteks. Ripley & Grace (1986) menekankan bahwa kondisi eksternal seperti budaya, norma sosial, dan kebijakan secara inheren memengaruhi jalannya implementasi di lapangan. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Kerobokan, realitas ini terwujud dalam keberagaman latar belakang agama dan budaya narapidana asing, sebuah faktor krusial yang secara langsung menciptakan tantangan signifikan terhadap efektivitas pembinaan kerohanian.

Analisis mendalam terhadap pengalaman narapidana asing mengungkapkan bahwa perbedaan latar belakang keagamaan dan linguistik menjadi hambatan utama dalam membangun koneksi spiritual yang substantif. Narapidana asing menyatakan kesulitan pribadi mereka untuk terhubung dengan praktik keagamaan di Lapas karena variasi aliran Kristen di Indonesia (Katolik dan Protestan) tidak selalu sejalan dengan ekspektasi atau kebutuhan rohani spesifik yang mereka miliki dari latar belakang agamanya. Lebih lanjut, keterbatasan penggunaan bahasa Inggris dalam ibadah menjadi penghalang partisipasi aktif, meskipun ada upaya sesekali untuk menyelenggarakan pelayanan dalam bahasa tersebut. Hal ini secara jelas mencerminkan bagaimana konteks budaya dan keagamaan yang berbeda secara fundamental menghambat efektivitas program pembinaan, khususnya dalam upaya membangun koneksi spiritual yang mendalam bagi narapidana asing.

Kedua perspektif yang triangulasi ini—dari narapidana asing yang merasakan langsung dampak internal dari perbedaan bahasa dan aliran keagamaan, serta dari petugas Lapas yang mengamati kendala operasional dan pemahaman substantif—secara jelas menunjukkan bahwa kondisi eksternal budaya dan bahasa menjadi faktor kritis yang secara fundamental memengaruhi keberhasilan program pembinaan kerohanian. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam konteks ini tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas ibadah secara umum. Analisis ini menyoroti kebutuhan mendesak akan adaptasi terhadap kebutuhan partikular warga binaan dengan latar belakang internasional, termasuk upaya strategis dalam penyediaan penerjemah atau materi multibahasa. Hal ini esensial untuk memastikan inklusivitas dan keberhasilan program pembinaan, mengubah kehadiran pasif menjadi partisipasi yang bermakna dan transformatif.

2. Keterbatasan Hubungan Sosial dan Komunitas

Aspek sosial dan emosional menjadi salah satu penentu penting bagi efektivitas partisipasi narapidana asing. Berdasarkan teori Ripley & Grace, faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan keberadaan komunitas sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Analisis ini menggarisbawahi bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas atau kurikulum, tetapi juga pada kemampuan narapidana untuk membangun dan mempertahankan koneksi sosial yang bermakna. Oleh sebab itu, secara struktural, hal ini mencerminkan kebutuhan akan dukungan eksternal yang lebih besar. Pelibatan komunitas keagamaan lintas budaya, organisasi relawan, atau fasilitator sosial menjadi penting untuk memperkuat jaringan sosial narapidana asing selama masa pembinaan. Ini juga termasuk penyediaan akses ke materi pembinaan dalam bahasa mereka. Pendekatan solutif yang lebih kontekstual dan berbasis pada latar belakang WBP asing perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan partisipasi aktif narapidana, sehingga tujuan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

3. Adaptasi Budaya Individual dan Fleksibilitas Lapas

Selanjutnya, aspek kontekstual yang penting dalam implementasi program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah kemampuan individu untuk beradaptasi

dengan lingkungan sosial dan budaya yang baru. Beberapa narapidana menunjukkan ketahanan sosial melalui penerimaan terhadap norma lokal, termasuk dalam hal makanan dan pola hidup sehari-hari. Kondisi adaptasi individu ini diimbangi dengan upaya fleksibilitas dari pihak Lapas dalam menyesuaikan prosedur pembinaan. Meskipun prosedur nasional menjadi pedoman utama, pelaksanaannya di tingkat Lapas Kelas IIA Kerobokan tetap menyesuaikan dengan konteks keberagaman latar belakang para narapidana, khususnya warga negara asing.

Dalam perspektif Ripley & Grace (1986), konteks sosial—yang mencakup norma budaya lokal dan kesiapan individu menghadapi perbedaan budaya—secara langsung memengaruhi efektivitas kebijakan. Lingkungan yang mendukung dan tidak terlalu "asing" bagi narapidana asing menjadi faktor eksternal yang memperkuat implementasi. Individu yang mampu menyesuaikan diri, seperti Coach Lala yang bahkan menjadi panutan bagi narapidana asing lainnya, menunjukkan bahwa adaptasi individu dapat mendorong proses pembinaan rohani berlangsung lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini menguatkan argumen bahwa adaptasi budaya individu terhadap konteks lokal berperan penting dalam keberhasilan program secara keseluruhan.

4. Ketersediaan Fasilitas Komunikasi

Adapun juga faktor eksternal yang turut mempengaruhi keberhasilan implementasi program pembinaan kepribadian rohani adalah tersedianya fasilitas komunikasi yang memadai bagi narapidana asing. Komunikasi dengan keluarga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas emosi dan kondisi psikologis narapidana.

Ketersediaan fasilitas komunikasi yang memadai merupakan faktor eksternal penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing. Komunikasi dengan keluarga adalah aspek krusial dalam menjaga stabilitas emosi dan kondisi psikologis narapidana.

Temuan di atas secara langsung mengindikasikan manfaat signifikan dari fasilitas komunikasi yang tersedia. Pernyataannya mengenai keberadaan wartel dan fitur videocall menegaskan bahwa narapidana dapat melakukan panggilan telepon dan melihat keluarga mereka. Akses terhadap fasilitas ini membantu narapidana asing tetap terhubung dengan keluarga, yang dalam konteks pemasyarakatan berfungsi sebagai sumber ketenangan emosional dan motivasi untuk aktif mengikuti program pembinaan. Bagi warga binaan asing yang terpisah jauh dari tanah air dan memiliki jaringan sosial lokal yang minim, akses komunikasi semacam ini menjadi penopang kesejahteraan psikologis esensial.

Dalam kerangka teori Ripley & Grace (1986), kondisi sosial dan dukungan eksternal merupakan bagian integral dari konteks yang memengaruhi implementasi kebijakan. Keberadaan fasilitas komunikasi yang memadai secara langsung mendukung terciptanya iklim sosial yang lebih stabil di dalam Lapas. Stabilitas ini pada gilirannya menunjang efektivitas program pembinaan, karena narapidana yang memiliki saluran komunikasi yang baik cenderung lebih terbuka dan partisipatif dalam mengikuti berbagai kegiatan, termasuk pembinaan rohani. Dengan demikian, penyediaan fasilitas komunikasi bukan hanya aspek penunjang, melainkan elemen kontekstual yang berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi program.

5. Peran Bahasa sebagai Penghubung dan Hambatan, serta Strategi Perwalian Lapas

Di sisi lain penulis menemukan bahwa bahasa merupakan elemen kontekstual yang paling krusial dalam kasus narapidana asing. Bahasa bisa menjadi penghubung untuk mengakses program pembinaan, tetapi sekaligus menjadi hambatan serius jika tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, bahasa merupakan elemen kontekstual paling krusial dalam kasus narapidana asing. Bahasa dapat berfungsi sebagai penghubung untuk mengakses program pembinaan, tetapi juga menjadi hambatan serius jika tidak dikelola secara efektif. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas narapidana asing mengalami kesulitan memahami Bahasa Indonesia, yang menjadi medium komunikasi utama di Lapas. Hal ini menciptakan tantangan signifikan dalam proses pembinaan. Namun, di sisi lain, terdapat inisiatif dari beberapa narapidana asing, seperti Coach Lala dan Tomy, yang berperan sebagai jembatan komunikasi antarbudaya. Coach Lala aktif menerjemahkan dan mengoordinasikan sesama narapidana asing, membantu mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman. Sementara itu, Tomy menunjukkan inisiatif untuk belajar Bahasa Indonesia dengan cepat demi membantu orang lain. Temuan ini memperlihatkan

bagaimana, meskipun ada hambatan bahasa, peran individu dapat mengisi kekosongan struktural dan mendukung implementasi program.

Perpaduan antara inisiatif narapidana asing dalam menjadi penghubung bahasa dan kebijakan Lapas melalui sistem perwalian menunjukkan adaptasi strategis dalam menghadapi tantangan bahasa. Ini selaras dengan teori Ripley & Grace (1986) yang menekankan bagaimana faktor kontekstual dapat diatasi melalui inovasi dalam implementasi kebijakan. Interaksi dinamis antara individu di Lapas dan respons kebijakan dari institusi menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih inklusif dan efektif bagi narapidana asing.

Dimensi Organisasi

Dimensi kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Ripley & Grace (1986) adalah kesiapan struktur organisasi dan sistem pendukungnya, termasuk infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana aspek organisasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan memfasilitasi atau menghambat program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing.

1. Kualitas Fasilitas dan Lingkungan Pembinaan

Kesiapan infrastruktur dan fasilitas menjadi indikator krusial dalam dimensi organisasi yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana ditekankan oleh Ripley & Grace (1986). Dalam konteks Lapas Kelas IIA Kerobokan, penting untuk menganalisis sejauh mana kualitas fasilitas dan lingkungan pembinaan yang tersedia mendukung efektivitas program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing. Lapas menunjukkan kapasitas adaptif dan inklusif dalam pengelolaan kegiatan keagamaan lintas agama. Fakta bahwa semua agama memiliki kesempatan setara untuk beribadah, dengan ketersediaan waktu dan ruang yang terorganisir, mengindikasikan adanya struktur yang mendukung keberagaman kebutuhan rohani narapidana asing. Temuan ini selaras dengan pandangan Ripley & Grace yang menekankan bahwa struktur organisasi yang responsif dan mampu mengakomodasi pluralitas merupakan kunci untuk efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, fasilitas yang memadai dan pengelolaan yang inklusif secara signifikan berkontribusi pada keberlangsungan dan efektivitas program pembinaan, serta mendorong keterlibatan aktif narapidana asing.

2. Upaya Lapas dalam Optimalisasi Fasilitas dan Evaluasi Hasil

Meskipun narapidana asing umumnya memberikan penilaian positif, pihak Lapas juga menyadari adanya keterbatasan fasilitas dan terus berupaya memperbaikinya. Franky Simin, petugas Lapas, menyampaikan bahwa meskipun tempat ibadah Kristen yang ada masih kurang besar dibandingkan jumlah WBP Kristiani (sekitar 250 orang di luar WNA), pihak Lapas tetap berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan melalui penambahan kanopi di sekitar tempat ibadah. Aspek adaptasi organisasional dan orientasi pada hasil merupakan komponen integral dari kesiapan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan (Ripley & Grace, 1986). Meskipun fasilitas yang ada dinilai positif oleh narapidana, pihak Lapas secara proaktif mengidentifikasi dan merespons keterbatasan yang ada. Komitmen Lapas untuk meningkatkan kenyamanan, terbukti dari inisiatif penambahan kanopi pada tempat ibadah yang kurang memadai, menunjukkan fleksibilitas dan tanggung jawab organisasi dalam memastikan keberlangsungan program. Respons adaptif terhadap kebutuhan fisik ini, bahkan di tengah keterbatasan sarana, mencerminkan pemahaman Lapas bahwa kualitas lingkungan fisik memengaruhi partisipasi dan pengalaman spiritual narapidana. Ini adalah indikasi bahwa organisasi tidak hanya menyediakan fasilitas statis, melainkan terus berinovasi untuk mengoptimalkan dukungan logistik demi tercapainya tujuan pembinaan.

3. Kesenjangan Peran Petugas Internal dan Ketergantungan Eksternal

Kendati Ripley & Grace menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi pelaksana menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Petugas lapas sebagai aktor dalam struktur organisasi memiliki peran sentral dalam mengelola, mengawasi, dan memfasilitasi program pembinaan, termasuk program keagamaan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa keterlibatan petugas dalam kegiatan keagamaan, khususnya pembinaan rohani bagi narapidana asing, cenderung bersifat administratif dan minim pendampingan substansial. Dari perspektif narapidana asing, keterlibatan petugas cenderung minimal dan bersifat administratif, seperti hanya mencatat kehadiran tanpa pendampingan mendalam. Persepsi ini menyoroti celah koordinatif internal di mana supervisi yang

minim dapat menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak konsisten. Meskipun program difasilitasi secara struktural, keterbatasan intervensi petugas dalam pembinaan spiritual yang lebih mendalam berpotensi menghambat pencapaian tujuan program, terutama bagi narapidana asing yang menghadapi kendala bahasa dan budaya.

Menariknya, celah ini sebagian diisi oleh peran informal dari sesama narapidana. Narapidana asing seperti Coach Lala secara proaktif mengambil peran sebagai koordinator dan penerjemah, menunjukkan adanya substitusi peran di tengah keterbatasan petugas formal. Fenomena ini, meskipun positif sebagai adaptasi sosial, juga mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas petugas dan pendekatan yang lebih humanis.

Di sisi lain, pihak Lapas menegaskan bahwa pengawasan ketat dan pendampingan tetap krusial. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Kerobokan menjelaskan bahwa kegiatan selalu didampingi dan diawasi petugas, memastikan keterpantauan dan kelancaran. Ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang institusi, fungsi pengawasan tetap berjalan, meskipun fokusnya mungkin lebih pada aspek keamanan dan teknis operasional. Perbedaan persepsi antara narapidana (merasakan kurangnya pendampingan personal) dan Lapas (menekankan pengawasan) menggarisbawahi kompleksitas peran petugas. Adanya inisiatif informal dari narapidana, yang kemudian direspons Lapas dengan sistem perwalian dan pengawasan, menunjukkan upaya adaptif untuk menjaga stabilitas program.

4. Peran Kolaborasi Eksternal dan Sumber Daya Tambahan

Interaksi yang terbatas dari pihak petugas lapas dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian rohani ini sebagian besar tertutupi oleh adanya kolaborasi dengan pihak eksternal, khususnya lembaga atau komunitas keagamaan dari luar. Peran eksternal ini menjadi vital, terutama dalam menyediakan kegiatan ibadah, pelayanan pastoral, serta dukungan spiritual yang lebih mendalam. Dalam hal ini, Lapas Kelas IIA Kerobokan tampak cukup terbuka dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Kolaborasi yang terbangun ini mencerminkan sebuah sistem yang bersifat inklusif dan suportif, di mana seluruh elemen – baik internal maupun eksternal – memiliki kepedulian yang sama dalam membina kepribadian narapidana. Terutama bagi warga negara asing, keberadaan sistem pendukung yang terkoordinasi ini mempermudah mereka untuk beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam program pembinaan yang ditawarkan, tanpa harus merasa terpinggirkan oleh batasan budaya dan bahasa. Dengan demikian, meskipun terdapat persepsi minimnya pendampingan langsung dari petugas internal seperti yang disampaikan Greg, keterlibatan aktif pihak eksternal menjadi pilar penting yang menopang keberlangsungan dan efektivitas program pembinaan kerohanian di Lapas Kerobokan. Dalam kerangka Ripley & Grace, variasi pelaksanaan program dan minimnya kontrol organisasi mencerminkan lemahnya sistem monitoring internal yang seharusnya menjadi tanggung jawab struktur pelaksana. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh niat baik atau dukungan fasilitas, tetapi juga oleh kepemimpinan, pengawasan, dan prosedur kerja yang jelas dalam organisasi. Oleh karena itu, tanpa tata kelola internal yang kuat dan keterlibatan aktif dari pihak pelaksana, efektivitas program pembinaan berpotensi melemah meskipun memiliki dukungan sarana dan kolaborasi yang baik.

Dimensi Aktor

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Grace, dimensi aktor menekankan pada peran individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Aktor-aktor ini bukan hanya pejabat formal atau pelaksana program, tetapi juga penerima manfaat kebijakan—dalam konteks ini, narapidana asing. Peran serta interaksi mereka, baik sebagai pelaksana maupun partisipan aktif, mempengaruhi sejauh mana kebijakan berjalan sesuai tujuan awal.

Di Lapas Kelas IIA Kerobokan, aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian rohani meliputi petugas lapas, pendamping rohani dari luar lembaga, dan para narapidana asing itu sendiri. Masing-masing memiliki kontribusi dan tantangan tersendiri dalam menjalankan atau mengikuti program. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana keberhasilan implementasi program ini, penting untuk menelaah bagaimana aktor-aktor tersebut berperan, berinteraksi, serta berkontribusi terhadap keberlangsungan program pembinaan keagamaan di dalam lapas.

1. Variasi Motivasi dan Partisipasi Narapidana

Dalam implementasi program pembinaan kepribadian rohani, aktor yang paling sentral adalah narapidana itu sendiri sebagai subjek yang menjalani proses pembinaan. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa tidak semua narapidana asing memiliki tingkat partisipasi atau motivasi yang seragam dalam

mengikuti program tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan dan cara pandang terhadap agama itu sendiri.

Dalam konteks dimensi aktor, implementasi program pembinaan kepribadian rohani sangat dipengaruhi oleh motivasi dan tingkat partisipasi narapidana, yang bervariasi secara signifikan. Beberapa narapidana asing menunjukkan kecenderungan untuk memandang agama sebagai urusan personal, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan keagamaan di Lapas terkesan minimal atau pasif. Pandangan ini menunjukkan adanya disparitas antara harapan program dan realitas keterlibatan individu, terutama ketika praktik keagamaan yang ditawarkan tidak selaras dengan preferensi atau pemahaman personal mereka. Sebaliknya, ditemukan pula narapidana asing dengan motivasi internal yang kuat dan didasari oleh keyakinan pribadi. Partisipasi mereka dalam program rohani berasal dari dorongan spiritual yang mendalam, bukan paksaan eksternal. Perbedaan ini krusial karena, menurut Ripley & Grace (1986), karakteristik dan kesiapan individu aktor implementasi secara langsung memengaruhi keberhasilan kebijakan. Motivasi yang berasal dari dalam diri mencerminkan kesesuaian antara nilai program dan nilai individu, yang secara teoretis akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Hal ini senada dengan studi tentang transformasi religius narapidana melalui pembinaan kerohanian Islam (Wiranu dan Butarbutar, 2022) dan ketahanan narapidana Muslim dari segi spiritualitas dan dukungan keluarga (Cahyani & Nashori, 2024) juga menegaskan pentingnya aspek internal dan eksternal dalam membentuk partisipasi dan hasil pembinaan. Variasi ini menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam desain program pembinaan, terutama bagi populasi narapidana asing yang heterogen secara budaya dan spiritual.

2. Peran Aktor Informal di Kalangan Narapidana

Namun demikian, di tengah variasi motivasi dan tingkat keterlibatan tersebut, terdapat pula narapidana asing yang tidak hanya aktif mengikuti program, tetapi juga memainkan peran penting sebagai pemimpin informal dan teladan bagi sesama WBP. Dalam hal ini, aktor tidak hanya berfungsi sebagai penerima kebijakan, tetapi juga turut menjadi pelaksana informal yang memperkuat efektivitas implementasi.

Peran seperti ini menjadi sangat penting dalam konteks Lapas, karena mereka membantu menjembatani relasi antara sesama narapidana dan juga menjadi contoh nyata dari keberhasilan program. Dalam kerangka Ripley & Grace, kehadiran aktor pelaksana informal seperti ini meningkatkan kapasitas implementasi, karena ia menciptakan pengaruh horizontal yang memperkuat pengawasan sosial dan dorongan moral di antara peserta program.

3. Kualitas Hubungan Interpersonal antara WBP dan Petugas/Pihak Eksternal

Lebih dari itu, narapidana seperti Coach Lala juga turut serta dalam menyebarkan nilai-nilai program pembinaan melalui pendekatan relasional yang lebih mudah diterima oleh sesama WBP. Hal ini memberikan nilai tambah yang tidak bisa sepenuhnya dicapai hanya oleh petugas resmi. Maka, dimensi aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada birokrat atau pelaksana formal, tetapi juga mencakup figur-figur kunci dalam komunitas narapidana yang secara aktif membentuk budaya disiplin dan partisipasi dari dalam. Dalam konteks ini, pelaksana kebijakan—baik petugas Lapas maupun tokoh agama dari luar—tidak hanya menjalankan prosedur administratif. Mereka juga berperan sebagai mitra dialog yang mendorong narapidana untuk merasa didengar dan dihargai. Kondisi seperti ini memperkaya pemahaman dimensi aktor, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup hanya bergantung pada rancangan program yang baik. Sebaliknya, hal ini sangat ditentukan oleh aktor-aktor yang mampu menjalin hubungan sosial yang kuat, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang aman bagi narapidana untuk bertumbuh secara rohani. Kualitas interaksi ini menjadi pondasi penting bagi keberhasilan program pembinaan.

4. **Komitmen Religius dan Dukungan Jaringan Sosial Eksternal**

Relasi interpersonal yang mendukung menjadi pondasi penting, namun yang tidak kalah signifikan dalam dimensi aktor adalah motivasi internal narapidana itu sendiri—khususnya dalam bentuk komitmen religius. Dalam kerangka teori Ripley & Grace, aktor implementasi mencakup individu yang terdampak oleh kebijakan dan berperan aktif dalam pelaksanaannya. Di sini, narapidana asing bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek aktif yang terdorong oleh keyakinan pribadi untuk ikut serta dalam program pembinaan keagamaan. Dengan adanya akses kepada jejaring sosial dan spiritual dari luar, program pembinaan tidak hanya berlangsung secara internal dan struktural, tetapi juga mendapatkan

energi tambahan dari dinamika interaksi antarpersonal. Hal ini sejalan dengan konsep dalam teori Ripley & Grace yang memandang aktor sebagai elemen aktif dan beragam dalam suatu sistem implementasi kebijakan—tidak hanya terbatas pada pelaksana formal, tetapi juga mencakup komunitas dan individu yang terlibat secara tidak langsung dalam mendukung keberlangsungan program.

Faktor Penghambat Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani

Implementasi program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan tidak berjalan tanpa tantangan. Meskipun program ini dirancang untuk memberikan pembinaan rohani sebagai bagian dari rehabilitasi narapidana, terdapat berbagai faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaannya. Faktor-faktor ini, yang melibatkan kondisi internal narapidana maupun lingkungan eksternal, memengaruhi efektivitas program dan partisipasi para narapidana dalam kegiatan yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana asing yang terlibat dalam program, serta pengamatan terhadap kendala yang mereka hadapi, dapat diidentifikasi sejumlah hambatan yang berperan dalam proses implementasi program. Hambatan-hambatan ini mencakup perbedaan latar belakang budaya dan agama, kendala bahasa, keterbatasan dukungan sosial, hingga faktor terkait fasilitas dan pengelolaan program yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan narapidana asing. Adapun pemahaman mengenai faktor-faktor penghambat ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan.

1. *Perbedaan Latar Belakang Budaya dan Agama*

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh narapidana asing dalam mengikuti program pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kelas IIA Kerobokan adalah perbedaan latar belakang budaya dan agama. Sebagai contoh, beberapa narapidana asing mengungkapkan ketidaknyamanan dalam mengikuti ibadah yang tidak sesuai dengan aliran agama mereka. Greg, seorang narapidana asing, mengungkapkan ketidaknyamanan ketika mengikuti ibadah yang diadakan di gereja, terutama karena adanya variasi antara aliran Katolik dan Protestan, serta perbedaan bahasa yang digunakan dalam ibadah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesesuaian antara aliran agama yang diterima dengan preferensi pribadi narapidana dapat mengurangi minat dan partisipasi mereka dalam program pembinaan rohani tersebut.

Kendala ini semakin diperburuk dengan kenyataan bahwa bahasa yang digunakan dalam ibadah tidak selalu dapat dipahami oleh semua narapidana asing, seperti yang diungkapkan oleh Greg yang kesulitan mengikuti ibadah jika tidak ada layanan dalam bahasa Inggris. Dari sisi narapidana asing lainnya, seperti Coach Lala dan Tomy, meskipun mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan program, kendala bahasa tetap menjadi tantangan dalam menjalin komunikasi yang efektif. Kendala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan narapidana asing dan kemampuan program dalam menyediakan pelayanan yang dapat diakses secara inklusif.

Menurut teori implementasi kebijakan Ripley dan Grace, faktor konteks eksternal, termasuk perbedaan budaya dan sosial, dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan atau program. Dalam hal ini, perbedaan latar belakang agama dan budaya dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam pencapaian tujuan program pembinaan rohani. Ketika perbedaan ini tidak diperhatikan dengan cermat oleh pihak yang menyelenggarakan program, maka kemungkinan besar implementasi program akan terhambat. Pengelolaan yang kurang sensitif terhadap keragaman budaya dan agama akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi narapidana dalam program pembinaan rohani.

2. *Keterbatasan Komunitas Sosial dan Dukungan Emosional*

Keterbatasan akses terhadap komunitas sosial dan dukungan emosional menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi narapidana asing dalam menjalani program pembinaan kepribadian rohani di Lapas Kelas IIA Kerobokan. Salah satu isu yang muncul adalah tidak adanya komunitas atau support system yang dapat memberikan dukungan psikologis kepada narapidana asing.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan Ripley dan Grace, faktor aktor dalam implementasi kebijakan menjadi sangat penting, terutama terkait dengan peran aktor kunci yang mendukung pelaksanaan program. Kurangnya dukungan sosial dari luar lapas menjadi penghambat yang jelas,

mengingat bahwa partisipasi narapidana dalam program pembinaan sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologis dan emosional mereka. Ketika narapidana asing merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan yang memadai, motivasi mereka untuk terlibat dalam program pembinaan rohani menjadi rendah.
Selain itu, konteks yang mencakup kondisi sosial dan budaya juga berperan dalam membentuk persepsi dan pengalaman narapidana terhadap dukungan sosial yang tersedia. Dalam hal ini, pengelola program perlu memahami bahwa penguatan dukungan sosial dalam bentuk komunitas yang inklusif, baik dalam bentuk pengunjung yang dapat diterima atau kegiatan kelompok, dapat memperbaiki kondisi emosional narapidana. Dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat koneksi sosial, baik secara virtual maupun langsung, program pembinaan rohani akan lebih efektif dalam memberikan manfaat jangka panjang.

3. Hambatan Bahasa dalam Komunikasi dan Partisipasi Program

Hambatan bahasa merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh narapidana asing adalah kesulitan dalam berkomunikasi, baik dengan sesama narapidana maupun dengan petugas lapas, yang berdampak langsung pada partisipasi mereka dalam program.
Dalam konteks teori implementasi kebijakan Ripley dan Grace, dimensi organisasi memainkan peran besar dalam keberhasilan implementasi program. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung keberhasilan program. Dalam hal ini, pengelola program pembinaan rohani seharusnya menciptakan struktur organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif dengan memberikan pelatihan bahasa atau menyediakan penerjemah yang lebih banyak untuk mendukung komunikasi antara narapidana asing dan petugas. Keberadaan program pelatihan bahasa juga dapat meningkatkan partisipasi narapidana asing dalam kegiatan keagamaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas program pembinaan rohani.
Selain itu, penguatan aktor dalam teori Ripley dan Grace juga menjadi penting. Ketika narapidana asing menghadapi hambatan bahasa, mereka sangat bergantung pada aktor yang dapat berfungsi sebagai penerjemah, seperti Coach Lala. Akan tetapi, dengan adanya keterbatasan aktor yang dapat berperan seperti ini, banyak narapidana asing yang terhambat untuk mengikuti program secara maksimal. Oleh karena itu, memastikan bahwa aktor yang terlibat dalam program pembinaan kepribadian rohani memiliki kemampuan bahasa yang memadai atau setidaknya didukung oleh sistem yang bisa menanggulangi kendala bahasa adalah langkah penting untuk meningkatkan implementasi program ini.

4. Minimnya Keterlibatan Petugas dalam Fasilitasi Program Rohani

Salah satu hambatan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya keterlibatan aktif dari petugas lapas dalam memfasilitasi pelaksanaan program pembinaan rohani. Meskipun program berjalan, beberapa narapidana asing merasakan bahwa petugas hanya hadir secara administratif tanpa benar-benar terlibat dalam pembinaan secara substantif.

5. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Meskipun secara umum Lapas Kerobokan telah menyediakan sarana ibadah bagi narapidana, termasuk bagi mereka yang beragama Kristen, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang dirasakan oleh narapidana asing. Fasilitas ibadah yang ada tidak selalu menjawab kebutuhan spiritual secara optimal, terutama terkait bahasa, kenyamanan ruang, dan frekuensi interaksi dengan pihak luar.
Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Ripley & Grace, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana. Ketika infrastruktur tidak dirancang secara inklusif dan adaptif terhadap latar belakang narapidana asing, maka potensi keberhasilan program pembinaan pun tereduksi. Oleh karena itu, penting bagi pihak lapas untuk mengevaluasi kembali desain fasilitas keagamaan agar lebih multibahasa dan responsif terhadap kebutuhan kultural yang beragam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, implementasi program pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing berjalan secara fungsional, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan program ini mengakomodasi hak-hak narapidana asing untuk menjalankan ibadah dan memperoleh pembinaan spiritual sesuai agama dan

kepercayaan masing-masing. Hal tersebut mencerminkan komitmen Lapas dalam menjunjung tinggi prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan penghormatan hak asasi manusia.
Pelaksanaan program pembinaan ini menghadapi sejumlah tantangan. Faktor-faktor penghambat meliputi perbedaan latar belakang budaya dan agama narapidana asing, kendala komunikasi akibat perbedaan bahasa, serta keterbatasan fasilitas sarana ibadah yang belum memadai. Tingkat keterlibatan petugas dalam kegiatan pembinaan rohani juga perlu ditingkatkan agar proses pendampingan berjalan lebih efektif dan personal.

Faktor pendukung seperti lingkungan sosial masyarakat Bali yang toleran terhadap keberagaman serta ketersediaan ruang ibadah, meskipun terbatas, serta peran dari pihak ketiga dari luar lapas dalam memberi kajian Rohani bagi narapidana asing di lapas kerobokan turut memberikan kontribusi dalam menciptakan suasana pembinaan yang inklusif. Keberhasilan program pembinaan rohani tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga sangat bergantung pada respons aktor pelaksana dan konteks sosial-budaya tempat kebijakan dijalankan.

Pembinaan kepribadian rohani bagi narapidana asing di Lapas Kelas IIA Kerobokan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses pemasyarakatan yang humanis, adaptif, dan berkeadilan. Optimalisasi program secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aspek spiritual narapidana, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media.

Avandi, S. N., & Subroto, M. (2023). Implementasi program pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIB Sleman. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 297–310.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Perkembangan pariwisata Provinsi Bali Desember 2024. Denpasar, Bali: Badan Pusat Statistik*.

Cahyani, A. D., & Nashori, F. (2024). The resilience of Muslim prisoners in terms of spirituality and family support. *Jurnal Psikologi Islami,* 10(1), 35–46. https://doi.org/10.19109/psikis.v10i1.18793

Creswell, J. W. (2016). *A mixed-method Approach*. SAGE.

Creswell, John W. (2009). *Third Edition Research Design Qualitative, Quatitave, and Mixed Approaches*. University Of Nebraska-Lincoln.

Detik.com. (n.d.). WNA penghuni Lapas Kerobokan meningkat selama semester I 2023. Diakses 20 Maret, 2025, dari https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6859586/wna-penghuni-lapas-kerobokan-meningkat-selama-semester-i-2023

Dewi, M. D. R., Mangku, D. G. S., & ... (2023). Implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui*, 3(1), 1–12.

Ditjenpas. (2020). S*tandar Pelayanan Pemasyarakatan dan Strategi Penerapan Tahun 2020*.

Fauzan, Nazaria, & Rifani. (2020). Implementasi pembinaan kepribadian narapidana berbasis pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. *Journal of Correctional Issues*, 3(1), 43–54.

Genny, G. S., & Salam, N. E. (2016). Pola komunikasi narapidana perempuan warga negara asing dalam berinteraksi dengan narapidana warga negara Indonesia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7, 93–172.

Hutabarat, R. R., Priyo, M., & Martha, A. E. (2024). Highlighting the state of correctional institutions in Indonesia after the prisoner assimilation policy in the COVID-19 pandemic. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3085-e3085.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. (n.d.). *Siraman rohani di Lapas Kls IIA Kerobokan*. Diakses 20 Maret 2025, dari https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/28526/siraman-rohani-di-lapas-kls-iia-kerobokan

Laode, N. M. (2025). Pentingnya pembentukan aturan pemindahan narapidana asing antar negara sebagai upaya perlindungan terhadap HAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–12.

Mahfud, R., Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, & Hadi, A. (2014). Pemenuhan hak narapidana laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh. Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*, 64(16), 539–556.

Mahmud, A. (2021). Problema pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 456–471.
Mahya, Z. (2024). Analisis yuridis terhadap pengaruh program pembinaan spiritual pada warga binaan pemasyarakatan. *Malaka Law Review*, 1(2), 43–48. https://www.ejournal.ybpindo.or.id/index.php/malaka
Mulyana, A., Dini, I., Tratasukma, S. R., Sondjaya, T., Ludiana, F., & Fachrizal, J. (2023). Pengaturan hak dan kewajiban narapidana Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan di dalam sistem peradilan pidana: Sebuah kajian terhadap implikasi perubahan undang-undang. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyaraka*t, 2(1), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx
Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*.
Samosir, D. (2016). *Penologi dan pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.
Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
Tempo.co. (2024). *Imigrasi: Puluhan juta WNA masuk RI pada Januari-Desember 2024, mayoritas dari Australia dan Cina*.Diakses 20 Maret, 2025, dari https://www.tempo.co/hukum/imigrasi-puluhan-juta-wna-masuk-ri-pada-januari-desember-2024-mayoritas-dari-australia-dan-cina-1183213
Umar Anwar, S. H. (2023). *Politik Hukum dan Pemasyarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Waluyo, B. (2023). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
Wiranu, R. E., & Butarbutar, H. F. (2022). Transformasi religius narapidana melalui pembinaan kerohanian Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 43-52.